

I. ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL

Analisa lingkungan eksternal Kota Solok dilakukan untuk mengidentifikasi peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Solok dalam lima tahun mendatang (2010-2015). Analisa lingkungan eksternal berkaitan dengan tiga arus perubahan yang terjadi, yaitu globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi.

Analisa Peluang Daerah

- (1) Globalisasi yang ditandai oleh perpindahan barang dan jasa, modal, dan informasi lintas daerah dan lintas negara secara bebas, serta interaksi pasar lokal, pasar daerah, pasar dalam negeri dan pasar internasional secara lebih terbuka memberi peluang bagi masa depan Kota Solok, yaitu:
 - a. Posisi strategis Kota Solok akan menjadi pusat pertumbuhan (aglomerasi) Sumatera bagian Tengah mata rantai perekonomian yang menghubungkan wilayah Sumatera dengan wilayah Jawa.
 - b. Perluasan pasar regional dan nasional akan meningkatkan kegiatan investasi, produksi dan perdagangan terutama komoditi utama yang diunggulkan Kota Solok seperti Jagung dan Beras,
 - c. Pengembangan kerjasama antar kawasan dan antar negara secara lebih luas dan nyata seperti Indonesia–Malaysia–Singapore–Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia–Malaysia–Thailand–Growth Triangle (IMT-GT) akan memperluas investasi, produksi, kesempatan kerja dan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
 - d. Perluasan kerjasama internasional dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015, APEC tahun 2020, dan kerjasama internasional lainnya akan mendorong perubahan nilai, etos kerja dan budaya kerja yang lebih produktif, efisien dan efektif bagi masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah Kota Solok
 - e. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah Kota Solok.
- (2) Demokratisasi yang ditandai oleh perubahan tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik dengan mengutamakan aspirasi dan partisipasi rakyat , memberikan peluang bagi Kota Solok untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, yaitu:

- a. Proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat akan selalu dilakukan secara transparan, partisipatif, adil dengan mempertimbangkan pentingnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar rakyat terutama hak sipil dan politik, dan hak sosial, ekonomi dan budaya rakyat.
 - b. Proses perumusan kebijakan dan pengelolaan sumber daya dan aset daerah akan memperhitungkan pelaksanaan prinsip demokrasi, keadilan, kesetaraan jender, keistimewaan, kekhususan, dan keragaman masyarakat.
 - c. Proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dari berbagai kebijakan dan program pembangunan akan mengutamakan partisipasi masyarakat sehingga mendorong pengembangan potensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan terciptanya suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, bermutu dan bermartabat.
- (3) Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan dan sumber daya bagi pemerintah daerah yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- a. Dengan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar, Pemerintah Kota Solok akan mempunyai kesempatan yang lebih luas dan terbuka untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, produktif dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.
 - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan akan memperhitungkan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya daerah, kearifan lokal, keragaman, kekhususan dan keragaman masyarakat.

Analisa Ancaman Daerah

- (1) Globalisasi membawa dampak yang dapat menjadi ancaman bagi Kota Solok yaitu:
- a. Arus masuk barang dari pasar internasional akan mendominasi pasar lokal yang berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatan para pelaku usaha di Kota Solok.
 - b. Krisis pangan, krisis ekonomi dan krisis energi yang berasal dari gejolak pasar internasional akan membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, dan menurunnya pendapatan daerah.

(2) Demokratisasi terkadang membawa perubahan yang tidak diharapkan bagi keberlanjutan pembangunan Kota Solok, yaitu:

- a. Proses konsultasi antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat sipil seringkali memerlukan waktu yang panjang, bertahap dan tidak pasti sehingga berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan.
- b. Pelaksanaan demokrasi seringkali dipahami secara sempit sebagai kebebasan dalam bentuk berbagai unjuk rasa yang tidak teratur, tanpa ijin dan merusak sehingga akan mengganggu ketertiban dan kehidupan masyarakat.
- c. Peran Partai Politik yang cenderung dominan berdampak pada melemahnya tingkat partisipasi masyarakat dan mengaburkan aspirasi masyarakat.

(3) Desentralisasi dan otonomi daerah membawa dampak yang dapat mengganggu kelancaran pembangunan Kota Solok, yaitu:

- a. Berbagai peraturan perundang-undangan seringkali tidak konsisten dan kurang sosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi seringkali menumbuhkan persaingan antar daerah yang cenderung mengabaikan kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang.
- c. Lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan, serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah.
- d. Meningkatnya kesenjangan antar Kabupaten/Kota sebagai akibat perbedaan kapasitas, sumber daya dan prasarana di daerah.

II. ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL

Analisa lingkungan internal Kota Solok dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Solok dalam lima tahun kedepan (2010-2015).

Analisa Kekuatan Daerah

- a. Posisi letak Kota Solok yang strategis dipersimpangan arah ke Kota – kota besar seperti Medan, Jakarta dan Palembang
- b. Sumberdaya manusia yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang cukup, terutama di bidang teknologi pengolahan benih jagung.
- c. Adanya peluang melakukan perubahan status kawasan hutan dari hutan lindung ke area penggunaan lain seluas 491 Ha.
- d. Memiliki Objek wisata alam yang potensial untuk dikembangkan.

Analisa Kelemahan Daerah

- a. Belum optimalnya pengembangan mutu sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh relatif rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), tingginya angka kemiskinan, banyaknya angka pengangguran,
- b. Belum optimalnya kinerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik.
- c. Belum optimalnya investasi swasta.
- d. Peraturan perundangan di daerah belum kondusif bagi pengembangan usaha.
- e. Belum optimalnya pelayanan pendidikan sebagai akibat terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, dan masih terbatasnya mutu pendidikan.
- f. Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat sebagai akibat terbatasnya fasilitas kesehatan
- g. Kota Solok memiliki permasalahan sosial yang cukup beragam di antaranya anak terlantar, pengemis dan gelandangan, korban penyalahgunaan narkoba, penyandang cacat, penderita HIV/AIDS, wanita rawan sosial ekonomi, fakir miskin, serta maraknya aksi anak-anak jalanan.

III. ISU STRATEGIS DAERAH

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, isu strategis daerah Kota Solok dalam lima tahun (2010-2015) mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya fasilitas dan sumber kesejahteraan sosial, mengakibatkan kecenderungan peningkatan terjadinya masalah – masalah sosial dan penyakit masyarakat akibat dari kurangnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai– nilai agama, adat dan budaya
- b. Lemahnya koordinasi antar SKPD untuk mendukung keserasian pembangunan daerah.
- c. Tingginya angka kemiskinan 13,88 % disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap kegiatan ekonomi, dan sulitnya mendapat pekerjaan ,
- d. Tidak seimbangnya antara pertumbuhan angkatan kerja yang besar dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga menyebabkan munculnya pengangguran
- e. Belum optimalnya pelayanan kesehatan terutama pada pelayanan akibat kecelakaan sebagai akibat terbatasnya fasilitas kesehatan, serta masih adanya beberapa kasus penyakit menular akibat dari rendahnya pengetahuan tentang hidup bersih dan sehat
- f. Secara umum mutu dan relevansi pendidikan masih rendah, hal ini tergambar dari masih belum optimalnya lulusan SLTA yang dapat diterima di perguruan tinggi negeri dan lulusan kejuruan belum mampu bersaing dipasar kerja
- g. 60 % dari angkatan kerja yang ada belum mempunyai keterampilan dan keahlian yang akan bersaing dipasar kerja, serta belum tersedianya prasarana dan sarana yang menunjang aktifitas positif kepemudaan
- h. Rendahnya produktivitas pertanian sebagai akibat, kurangnya penyuluhan, tingginya fluktuasi harga pasar, terbatasnya prasarana jalan usaha tani dan terbatasnya industri pengolahan hasil pertanian;
- i. Belum optimalnya fungsi pusat-pusat pertumbuhan dalam wilayah yang lebih luas terutama pusat-pusat permukiman yang berada di sekitar perbatasan dengan Kabupaten lain.
- j. Masih rendahnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
- k. Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan telah menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan menimbulkan kecenderungan penurunan daya dukung lingkungan.
- l. Lemahnya kontrol dari pengelola kawasan lindung mengakibatkan kawasan hutan terus menjadi sasaran penebang kayu liar dan perambah hutan.

- m. Terdapatnya wilayah rawan banjir di beberapa titik lokasi yaitu di sekitar Sungai Batang Lembang dan sungai batang binguang sehingga memerlukan pengendalian yang ketat terhadap pembangunan di sekitar sungai-sungai tersebut.
- n. Belum optimalnya langkah antisipasi semua komponen pembangunan di Kota Solok dalam mempersiapkan diri menghadapi terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015.
- o. Tidak seimbangnya jumlah pedagang dengan prasarana dan sarana yang tersedia, mengakibatkan pedagang belum dapat ditata sesuai peruntukan serta mengganggu terhadap kenyamanan konsumen berbelanja.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI

Berdasarkan permasalahan pokok pembangunan dan analisa isu-isu strategis serta mengacu kepada RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025, dapat dirumuskan visi untuk mewujudkan pembangunan lima tahun ke depan sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern".

Visi tersebut di atas mengandung pengertian bahwa Kota Solok dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan fokus dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengerahkan dan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih juga diarahkan untuk menuju kota perdagangan dan jasa yang maju dan modern.

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- BERIMAN : Suatu kondisi masyarakat yang meyakini bahwa adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan syariat Islam dengan baik
- BERTAQWA : Suatu kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai, norma dan kaidah agama khususnya Islam sebagai pedoman dalam seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama
- SEHAT : Suatu kondisi masyarakat yang memahami pola hidup yang bersih dan sehat sehingga mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi dan dapat bebas dari gangguan kesehatan

EDUKATIF	: Suatu kondisi masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
SEJAHTERA	: Suatu keadaan dimana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak – hak dasarnya dibidang sosial, ekonomi, dan budaya terutama pangan, sandang, dan papan, memiliki rasa aman dan kepercayaan yg tinggi kepada pemerintahan sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju, serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya.
PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH	: Kondisi penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih, ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan yang transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, efektif dan efisien kepada masyarakat.
KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN MODERN	: Kondisi aktivitas perdagangan dan jasa yang maju dan modern melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa yang representatif dan meningkatnya kontribusi sektor dimaksud dalam PDRB Kota Solok. Kondisi ini akan dicapai secara bertahap sampai tahun 2025 seperti yang tertuang pada RPJPD Kota Solok 2005-2025.

5.1 MISI

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan yang telah menuai beragam hasil pada periode 2005-2010, tentu harus terus dipelihara dan ditumbuh kembangkan. Capaian dan prestasi pembangunan di periode 2005-2010 itu pada hakekatnya adalah salah satu modal dasar yang harus dilanjutkan untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik lagi pada periode lima tahun yang akan datang, 2010-2015. Pada periode 2010-2015 Kota Solok harus terus berupaya keras untuk mencapai perbaikan di bidang agama dan budaya,

pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemuda, olah raga, ekonomi, tata kelola pemerintahan dan fasilitas pelayanan umum.

Misi pembangunan tahun 2010-2015 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi kota Solok tahun 2010-2015 yaitu **Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertakwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern**, namun tidak terlepas dari kondisi dan tantangan baik internal maupun eksternal pada kurun waktu 2010-2015 yang mempengaruhinya. Untuk mewujudkan visi kota Solok tahun 2010-2015 dijabarkan dalam misi Pemerintah Daerah tahun 2010-2015 sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertakwa

Agama merupakan landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau, yang dijadikan sebagai landasan dan upaya utama untuk dapat mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertakwa. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama oleh masyarakat Kota Solok dan Sumatera Barat umumnya. Ciri-ciri tata kehidupan yang demikian antara lain adalah: taat beragama, berakhlak mulia, jujur, peduli sesama manusia, menerapkan tata kehidupan beragama yang baik, rukun dengan agama lain serta peduli terhadap masa depan dan keselamatan masyarakat dan bumi ciptaan Allah SWT.

Misi 2: Menyelenggarakan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*Good Local Governance and Clean Government*)

Tata pemerintahan yang baik dan bersih merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan Solok sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Tata pemerintahan yang baik adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pemerintahan berjalan secara demokratis, taat pada aturan hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh segenap lapisan masyarakat

Misi 3: Mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya di tengah masyarakat berlandaskan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah

Berdasarkan perkembangan pembangunan Kota Solok beberapa tahun terakhir, ke depan diperkirakan masyarakat Kota Solok berpotensi menjadi masyarakat yang multikultur, karena kehidupan kota yang sangat terbuka terhadap kedatangan berbagai kelompok masyarakat dan sosial lainnya. Seiring dengan meningkatnya pembangunan Kota Solok, kehadiran masyarakat dari wilayah lain, baik dari dalam Provinsi Sumatera Barat atau dari daerah lain di Indonesia akan terus mewarnai mozaik sosial kota. Masyarakat Kota Solok diperkirakan akan semakin heterogen dan majemuk dalam hal keanekaragaman golongan masyarakatnya, akibat perbedaan asal usul, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan dan gaya hidup. Dalam kondisi sosial yang beranekaragam tersebut, sikap toleran antar masyarakat yang multikultur sangat diperlukan. Perbedaan latar belakang agama, kebudayaan dan asal usul perlu disatukan dengan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, dengan berlandaskan kepada falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

Misi 4: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan

Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan prasyarat mutlak untuk dapat menjadikan Kota Solok yang maju dan mampu bersaing dengan daerah lain. Sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, pengembangan *Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni* (IPTEKS) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat.

Misi 5: Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan

Kesejahteraan sosial merupakan serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial, baik berupa pencegahan, pengembangan, maupun perehabilitasian, guna mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosialnya. Sementara itu, bila dilihat dari data keluarga miskin yang ada, diketahui bahwa pada umumnya masyarakat yang termasuk ke dalam keluarga miskin adalah yang mengalami permasalahan sosial. Karena itu, fokus pelayanan diarahkan pada kelompok yang beresiko tinggi, ibu dan anak, kelompok usia

manula, anak terlantar, dan anak yatim. Kemudian, persoalan kesejahteraan sosial juga perlu didekati melalui sistem jaminan sosial yang terbangun dan proses peningkatan kemampuan atau pemberdayaan (*empowerment*), yang menjadikan kelompok tersebut menjadi modal pembangunan.

Misi 6: Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga

Keberadaan pemuda sangat potensial dalam proses pembangunan kota, karena itu, perlu dipersiapkan dalam berbagai bentuk, baik dalam pengembangan keterampilan kerja, pengembangan keterampilan berorganisasi, pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan keterlibatan mereka dalam segala bentuk kegiatan keolahragaan dan seni. Upaya ini sekaligus diharapkan dapat memperkecil dampak negatif dari arus globalisasi.

Misi 7: Meningkatkan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata

Aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Dengan mempertimbangkan peluang yang ada dan disertai dengan potensi yang dimiliki oleh Kota Solok, maka diharapkan kota ini akan dapat berkembang pesat pada bidang perdagangan dan jasa.

Kota Solok yang dikelilingi oleh daerah penghasil produk pertanian tanaman pangan, peternakan dan perkebunan seperti Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung dan Tanah Datar, pada umumnya hasil produksi tersebut diolah dan dipasarkan melalui Kota Solok. Memperhatikan potensi ini, Kota Solok dapat dijadikan sebagai pusat agribisnis yang meliputi kegiatan pengolahan hasil produk pertanian dan pemasarannya baik dalam daerah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau maupun Provinsi Sumatera Utara dan Jambi. Untuk itu, perlu dikembangkan berbagai industri pengolahan hasil pertanian dan fasilitas pasar khusus untuk produk-produk pertanian, peternakan dan perkebunan.

Sejalan dengan perkembangan usaha perdagangan dan jasa di atas, perlu pula dikembangkan kegiatan usaha pariwisata yang dikelola secara profesional dan bermartabat. Kegiatan pariwisata meliputi perhotelan, pengelolaan objek wisata dan penjualan cendera mata (*souvenir*). Pengembangan kegiatan pariwisata ini dilakukan

secara bermartabat dengan menjunjung tinggi unsur agama dan budaya dan menghindari unsur prostitusi dan perjudian.

Misi 8: Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum

Penyediaan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum perkotaan sangat penting artinya dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat baik dibidang ekonomi maupun bidang sosial. Tidak dapat disangkal bahwa kegiatan ekonomi dan sosial sangat tergantung pada ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan seperti jalan, terminal, tenaga listrik dan air minum, fasilitas telekomunikasi, fasilitas pasar dan pertokoan dan lainnya. Dengan tersedianya prasarana dan sarana tersebut secara cukup dan berkualitas, maka aktivitas masyarakat akan dapat dikembangkan dengan lebih cepat serta mempunyai daya saing yang kuat. Dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum, perlu ditata dengan baik yang diatur dalam dokumen rencana tata ruang yang ada.

Misi 9: Meningkatkan pemberdayaan dan pendapatan masyarakat

Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan melalui peningkatan pemberdayaan dan pendapatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki dan kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan kota. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan, secara tidak langsung mereka juga dapat memperoleh *benefit* dari proses pembangunan itu sendiri yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Misi 10: Menegakkan peraturan daerah yang berkeadilan

Penegakan peraturan daerah yang berkeadilan merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam menjaga sistem demokrasi yang berkualitas dan juga mendukung iklim berusaha yang baik agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti, aman dan efisien, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena itu, dalam pembangunan bidang hukum perlu dilakukan dengan baik yang mencakup proses pembuatan peraturan daerah, proses penjabaran/sosialisasi, proses pengawasan dan juga penegakan peraturan daerah itu sendiri.

AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Agenda Pembangunan Daerah

Agenda pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mendorong proses pembangunan daerah secara menyeluruh. Sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan agenda pembangunan Provinsi Sumatera Barat, maka ditetapkan pula agenda pembangunan daerah Kota Solok untuk periode 2010-2015 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan tatanan kehidupan masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berbudaya

Peningkatan kualitas dan tatanan kehidupan masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berbudaya merupakan landasan utama untuk dapat mewujudkan pembangunan daerah yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Melalui agenda pembangunan daerah ini akan diwujudkan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa guna terciptanya suatu masyarakat dan pemerintahan yang agamais. Disamping itu, keselarasan antara ajaran agama dan budaya daerah dengan kebiasaan hidup masyarakat tetap terpelihara dengan baik.

2. Pembangunan hukum dan tata pemerintahan yang baik dan bersih

Pembangunan hukum dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dan penyelenggara pemerintahan agar terwujud kondisi masyarakat yang taat aturan untuk mendorong efektifitas dan percepatan pembangunan. Sejalan dengan itu pembangunan tata pemerintahan yang baik dan bersih dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

3. Pembangunan sosial dan sumber daya manusia yang berkualitas

Pembangunan sosial dan sumber daya manusia yang berkualitas dilakukan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan sosial yang ada pada masyarakat dan mewujudkan kondisi masyarakat yang sehat, berpendidikan, serta berdaya saing. Termasuk dalam agenda ini meliputi peningkatan pembangunan di bidang pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis sosial.

4. Pembangunan ekonomi rakyat yang berdaya saing

Pembangunan ekonomi rakyat yang berdaya saing merupakan landasan utama dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional umumnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada khususnya. Melalui agenda ini yang akan diwujudkan adalah peningkatan

pertumbuhan ekonomi, terciptanya lingkungan berusaha yang aman dan nyaman, peningkatan kompetensi dan daya saing pelaku usaha perdagangan dan jasa serta industri kecil/rumah tangga.

5. Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan yang berwawasan lingkungan

Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan mutlak terus dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan umum kepada masyarakat seperti jalan, jembatan, air bersih, sarana perdagangan, pendidikan, kesehatan dan sarana umum lainnya. Pembangunan prasarana dan sarana dimaksud harus berwawasan lingkungan sehingga kualitas lingkungan dapat terpelihara dengan memperhatikan penataan ruang sesuai aturan, sehingga pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dapat diupayakan dengan memelihara cadangan air serta meningkatkan konservasi alam. Melalui agenda ini akan diwujudkan peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang secara konsisten, peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur kota, peningkatan kualitas pelayanan air bersih, peningkatan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan permukiman, peningkatan pengelolaan sanitasi kota, peningkatan kualitas pelayanan jasa transportasi serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

PERSANDINGAN AGENDA NASIONAL, PROVINSI DAN KOTA SOLOK

Nasional	Provinsi	Kota
Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Pembangunan ekonomi rakyat yang berdaya saing
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pembangunan hukum dan tata pemerintahan yang baik dan bersih
Penegakan Pilar Demokrasi	Peningkatan Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah	Peningkatan kualitas dan tatanan kehidupan masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berbudaya
Penegakan Hukum	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan IPTEKS	Pembangunan sosial dan sumber daya manusia yang berkualitas
Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan	Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup	Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan yang berwawasan lingkungan

Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan adalah kumpulan program strategis yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari masing-masing agenda pembangunan, sedangkan Program Strategis didasarkan pada visi, misi dan strategi pembangunan daerah. Agenda pembangunan Kota Solok tahun 2010-2015 dijabarkan ke dalam tiga belas prioritas pembangunan, yaitu: 1) Peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta Peningkatan kualitas nilai-nilai adat dan kebudayaan daerah, 2) Peningkatan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan, 3) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, 4) Peningkatan kesejahteraan sosial dan Penanggulangan kemiskinan, 5) Peningkatan daya saing produk UMKM dan fasilitas pendukung produksi dan pemasaran, 6) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi, 7) Peningkatan pelayanan infrastruktur kota, 8) Peningkatan pengelolaan sanitasi dan air bersih, 9) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata, 10) Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup, 11) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, 12)

Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga, 13) Peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat.

Tabel 5.1
Hubungan antara Misi, Agenda, dan Prioritas Pembangunan

NO	Misi	Agenda	Prioritas Pembangunan
1	Misi 1 Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa	Peningkatan kualitas dan tatanan kehidupan masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berbudaya	1. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta Peningkatan kualitas nilai-nilai adat dan kebudayaan daerah
	Misi 3 Mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya di tengah masyarakat berlandaskan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah		
2	Misi 2 Menyelenggarakan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (<i>Good Local Governance and Clean Government</i>)	Pembangunan hukum dan tata pemerintahan yang baik dan bersih	1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi
	Misi 10 Menegakkan peraturan daerah yang berkeadilan		2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
			3. Peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat
3	Misi 4 Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan	Pembangunan sosial dan sumber daya manusia yang berkualitas	1. Peningkatan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan
	Misi 5 Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan		2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

NO	Misi	Agenda	Prioritas Pembangunan
	Misi 6 Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga		3. Peningkatan kesejahteraan sosial dan Penanggulangan kemiskinan
			4. Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga
4	Misi 7 Meningkatkan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata	Pembangunan ekonomi rakyat yang berdaya saing	1. Peningkatan daya saing produk UMKM dan fasilitas pendukung produksi dan pemasaran
			2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata
	Misi 9 Meningkatkan pemberdayaan dan pendapatan masyarakat		
5	Misi 8 Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum	Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan yang berwawasan lingkungan	1. Peningkatan pelayanan infrastruktur kota
			2. Peningkatan pengelolaan sanitasi dan air bersih
			3. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup

Prioritas 1: Peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta Peningkatan kualitas nilai-nilai adat dan kebudayaan daerah .

Prioritas peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta peningkatan kualitas nilai-nilai adat dan kebudayaan daerah diarahkan untuk dapat menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa dengan menjalankan syariat agama sebagaimana mestinya serta peningkatan peran

kelembagaan adat dan budaya dalam menggerakkan pembangunan, peningkatan nilai-nilai adat, seni dan budaya lokal serta pengembangan kesenian anak nagari

Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah ; 1) peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama, 2) peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kegiatan keagamaan, 3) peningkatan kualitas pendidikan keagamaan baik formal maupun non formal dan 4) peningkatan kapasitas lembaga-lembaga keagamaan, 5) peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai seni, adat dan budaya, dan 6) peningkatan kualitas kelembagaan adat dan budaya

Prioritas 2: Peningkatan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan.

Prioritas Peningkatan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan ditujukan untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang selalu ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah ; 1) peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan yang sesuai standar, 2) peningkatan kompetensi guru, 3) manajemen sekolah yang profesional, 4) peningkatan minat baca masyarakat dan 5) pelayanan pendidikan yang bermutu di kawasan Sumatera Bagian Tengah.

Prioritas 3: Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Prioritas peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah ; 1) peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan yang sesuai standar, 2) peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang kesehatan, 3) peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat dan 4) terlaksananya manajemen pelayanan kesehatan yang profesional sehingga terwujud pelayanan kesehatan yang bermutu di kawasan Sumatera Bagian Tengah.

Prioritas 4: Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang menjadi perhatian khusus mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah 1) penurunan jumlah penduduk miskin melalui perluasan lapangan kerja, penurunan jumlah angka pengangguran dan peningkatan

kualitas kelembagaan sosial 2) peningkatan produktifitas usaha mikro dan kecil masyarakat, 3) peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta 4) memberdayakan lembaga penanggulangan kemiskinan.

Prioritas 5: Peningkatan daya saing produk UMKM dan fasilitas pendukung produksi dan pemasaran.

Prioritas peningkatan daya saing UMKM dan fasilitas pendukung produksi dan pemasaran menjadi sangat strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah karena peningkatan daya saing UMKM dapat mengatasi masalah ekonomi dan sosial sekaligus. Selain pertumbuhan ekonomi, meningkatnya daya saing UMKM juga berdampak terhadap pemerataan pendapatan dan hal ini akan berimplikasi dalam mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah 1) peningkatan kelembagaan dan dukungan modal usaha bagi UMKM, 2) peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku usaha dan produk UMKM serta 3) peningkatan investasi, iklim berusaha dan penciptaan lapangan kerja.

Prioritas 6: Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi.

Prioritas peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi merupakan faktor penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah 1) peningkatan kualitas disiplin dan kesejahteraan aparatur, 2) peningkatan efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah, 3) peningkatan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, 4) peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pemerintah daerah serta 5) peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel.

Prioritas 7: Peningkatan pelayanan infrastruktur kota.

Pembangunan infrastruktur kota akan memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial dengan mengutamakan kepentingan masyarakat guna mendorong partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kota meliputi jalan, jembatan, irigasi, prasarana dan sarana perdagangan dan sebagainya guna mendukung aktifitas masyarakat sehari-hari.

Prioritas 8: Peningkatan pengelolaan sanitasi dan air bersih.

Prioritas Peningkatan pengelolaan sanitasi dan air bersih sangat penting bagi sebuah kota untuk memenuhi kebutuhan standar bagi masyarakat perkotaan. Bila hal ini kurang diperhatikan,

akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah 1) peningkatan pengelolaan persampahan, air limbah dan drainase serta 2) peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih.

Prioritas 9: Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga.

Prioritas Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana pemuda dan olah raga yang representatif yang dapat menunjang peningkatan prestasi olah raga bagi siswa dan masyarakat serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah 1) peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana olah raga yang representatif, 2) peningkatan kompetensi kelembagaan pemuda dan olah raga, dan 3) peningkatan prestasi olah raga.

Prioritas 10: Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup.

Prioritas Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup ditujukan untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan, pelayanan dan pembangunan infrastruktur di pusat kota dan pinggiran, sehingga perkembangan fisik kota dapat lebih terarah dan terkendali sesuai dengan kondisi disetiap bagian wilayah kota. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah 1) peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten serta 2) peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Prioritas 11: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan salah satu indikator pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah 1) peningkatan pengelolaan sumber-sumber pendapatan, 2) peningkatan pengelolaan asset, dan 3) peningkatan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah.

Prioritas 12: Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata.

Prioritas peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata diarahkan kepada penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang representatif. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah 1) Pembenahan objek wisata, 2) Peningkatan promosi kepariwisataan, dan 3) Peningkatan kerjasama/kemitraan pengembangan kepariwisataan.

Prioritas 13: Peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat.

Prioritas Peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat diarahkan kepada peningkatan pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tersedianya piranti hukum yang menjamin hak publik atas informasi setiap kebijakan pemerintah daerah dan meningkatnya kualitas, kesejahteraan dan ketersediaan sarana aparat

penegak peraturan daerah. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah 1) peningkatan kualitas produk hukum daerah, 2) peningkatan penegakan produk hukum daerah, 3) peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum, dan 4) peningkatan pemahaman terhadap produk hukum.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Tataan Kehidupan Masyarakat Yang Beriman Dan Bertaqwa

Masyarakat yang mengamalkan syariat agama sesuai dengan perintah Allah merupakan suatu kewajiban umat dalam rangka mewujudkan tataan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.

Tujuan yang akan dicapai dari peningkatan kualitas tataan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa adalah meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan serta kapabilitas lembaga keagamaan.

Dengan sasaran meningkatnya kualitas pendidikan keagamaan baik formal maupun non formal, meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat

Untuk mewujudkan misi tersebut, dilaksanakan melalui beberapa strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 1

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern			
Misi 1 : Meningkatkan kualitas tataan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan serta kapabilitas lembaga keagamaan	1. Meningkatnya kualitas pendidikan keagamaan baik formal maupun non formal	1. Meningkatkan kualitas peranan pendidikan formal dan non formal terhadap pendidikan agama	1. Meningkatkan pembinaan bagi tenaga pendidik non formal (Pendidik keagamaan)
		2. Mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga keagamaan	1. Meningkatkan peran dan keterlibatan pengurus mesjid dan mushalla

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern			
Misi 1 : Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2. Meningkatkan pembinaan terhadap institusi keagamaan
	2. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan 2. Mendorong partisipasi masyarakat dan perantau dalam mengembangkan prasarana dan sarana ibadah	1. Meningkatkan peran serta masyarakat pada perayaan hari-hari besar keagamaan 2. Membantu dan mendorong partisipasi umat untuk pembangunan, rehabilitasi prasarana dan sarana keagamaan

Misi 2: Menyelenggarakan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*Good Local Governance and Clean Government*)

Penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat yang mendambakan tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, akuntabel, efektif, efisien menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari *Korupsi, Kolusi* dan *Nepotisme* (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan yang akan dicapai dari penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*Good Local Governance and Clean Government*) adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pembangunan dan terjaminnya hak masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil.

Dengan sasaran meningkatnya kualitas disiplin dan kesejahteraan aparatur, meningkatnya efesiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah, terwujudnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pemerintah daerah dan terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel.

Untuk mewujudkan misi tersebut, dilaksanakan melalui beberapa strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 2

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern			
Misi 2 : Menyelenggarakan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (<i>Good Local Governance and Clean Goverment</i>)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih	1. Meningkatnya kualitas disiplin dan kesejahteraan aparatur	1. Memberikan reward dan punishment dalam meningkatkan kinerja aparatur	1. Meningkatkan kualitas, kepatuhan, kesejahteraan dan profesionalisme aparatur yang didukung sarana dan prasarana yang memadai
		2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur	1. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur 2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan profesionalisme tenaga pengawas
	2. Meningkatnya efesiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah	1. Menyusun formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	1. Merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan formasi 2. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi
		2. Mengoptimalkan pengelolaan administrasi pemerintahan	1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan arsip daerah

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertakwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern

Misi 2 : Menyelenggarakan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*Good Local Governance and Clean Goverment*)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	1. Mengoptimalkan penerimaan daerah 2. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas administrasi pengelolaan keuangan daerah dan kekayaan daerah
	3. Terwujudnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	1. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan	1. Meningkatkan koordinasi dan mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat dan stakeholder 2. Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
		2. Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan publik	1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemerintah daerah	1. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pemerintah daerah	1. Meningkatkan sarana dan prasarana serta SDM aparatur pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan daerah
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pembangunan	1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	1. Optimalisasi perencanaan pembangunan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dnegan peraturan yang berlaku
		2. Meningkatnya keterlibatan tokoh adat, ninik mamak dan bundo kanduang dalam pembangunan	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholder dalam seluruh tahapan pembangunan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern			
Misi 2 : Menyelenggarakan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (<i>Good Local Governance and Clean Goverment</i>)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Meningkatkan semangat kegotongroyongan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan
4. Terjaminnya hak masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil	1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat	1. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Misi 3: Mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya di tengah masyarakat berlandaskan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah

Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan Kota Solok kehadiran masyarakat dari wilayah lain, baik dari dalam Provinsi Sumatera Barat atau dari daerah lain di Indonesia akan turut mewarnai kehidupan sosial, adat dan budaya hal ini karena adanya perbedaan asal usul, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan dan gaya hidup. Dalam kondisi sosial yang beranekaragam tersebut, sikap toleran antar masyarakat yang multikultur sangat diperlukan. Perbedaan latar belakang agama, kebudayaan dan asal usul perlu disatukan dengan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, beradat, berbudaya dan agamis dengan tetap berlandaskan kepada falsafah "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah".

Cita-cita luhur untuk mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, beradat dan berbudaya serta masyarakat yang agamis berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" yang merupakan kekuatan utama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau untuk dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang beradat, berbudaya dan agamis tersebut. Falsafah masyarakat Minangkabau tersebut telah dimiliki sejak lama, kedepan perlu terus dilestarikan, dipelihara, dikembangkan dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Ciri-ciri tata kehidupan yang demikian antara lain adalah : taat menjalankan ajaran agama, berahlak mulia, jujur,

toleran kepada sesama, rukun dengan agama lain, menjunjung tinggi budaya dan adat Minangkabau.

Tujuan yang akan dicapai dari pengembangan nilai-nilai adat dan budaya di tengah masyarakat berlandaskan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah adalah meningkatkan kualitas dan kapabilitas lembaga adat dan budaya dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebudayaan.

Dengan sasaran meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya, meningkatnya kualitas kelembagaan adat dan budaya, meningkatnya kualitas kelembagaan adat dan budaya, meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana kebudayaan.

Untuk mewujudkan misi tersebut, dilaksanakan melalui beberapa strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 3

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern			
Misi 3 : Mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya di tengah masyarakat berlandaskan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas lembaga adat dan budaya	1. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	1. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya di tengah-tengah masyarakat	1. Pengembangan nilai-nilai adat, kesenian dan kebudayaan daerah
		2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman generasi muda tentang adat dan budaya	1. Melakukan pembinaan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya
	2. Meningkatnya kualitas kelembagaan adat dan budaya	1. Mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga adat dan budaya	1. Meningkatkan pemahaman pengelola/pengurus lembaga-lembaga adat tentang budaya dan adat minangkabau
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan	1. Meningkatnya ketersediaan prasarana	1. Mengakomodir penyediaan sarana dan	1. Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana

prasarana kebudayaan	dan sarana kebudayaan	prasarana kebudayaan	kebudayaan
----------------------	-----------------------	----------------------	------------

Misi 4: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan

Sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berkualitas merupakan modal untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumberdaya manusia yang berkualitas, sehat dan sejahtera diwujudkan melalui pendidikan yang bermutu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang sesuai dan merata keseluruhan lapisan masyarakat.

Tujuan yang akan dicapai dari peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan adalah Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan, Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan khususnya melalui bidang pusdokinfo (perpustakaan, dokumentasi dan informasi), Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam keluarga.

Dengan sasaran Terwujudnya pelayanan pendidikan yang bermutu di kawasan Sumatera Bagian Tengah, terlaksananya manajemen sekolah yang profesional, tersedianya prasarana dan sarana penunjang pendidikan yang sesuai standar, meningkatkan pelaksanaan program RSBI, meningkatnya kompetensi guru, meningkatnya minat baca masyarakat dan terbinanya perpustakaan, terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu di kawasan Sumatera Bagian Tengah, tersedianya prasarana dan sarana penunjang dan kesehatan, terlaksananya manajemen kesehatan yang profesional dan meningkatnya mutu pelayanan keluarga berencana yang berkualitas.

Untuk mewujudkan misi tersebut, dilaksanakan melalui beberapa strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 4

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern			
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas	1. Terwujudnya	1. Merintis pendirian	1. Melakukan kajian pendirian

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertakwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern

Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
manajemen pelayanan pendidikan	pelayanan pendidikan yang bermutu di kawasan Sumatera Bagian Tengah	boarding school 2. Mengoptimalkan pelayanan pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah	boarding school 1.Meningkatkan kualitas pelaksanaan program Wajar Dikdas 9 tahun menuju Wajar 12 tahun 2. Mengkaji dan mengembangkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan kurikulum nasional, nasional plus dan internasional disemua jenjang/jalur pendidikan 3. Pemberian beasiswa 4. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan
	2. Terlaksananya manajemen sekolah yang profesional	1.Meningkatkan kemampuan SDM pengelola manajemen sekolah	1. Meningkatnya kemampuan SDM pengelola manajemen sekolah 2. Melakukan kerjasama dengan lembaga- lembaga pendidikan dalam dan luar negeri
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Tersedianya prasarana dan sarana penunjang pendidikan yang sesuai standar	1. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan	1. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berkualitas
	2. Meningkatkan pelaksanaan program RSBI	1. Mengembangkan sekolah RSBI	1. Mengkaji dan mengembangkan mutu kurikulum muatan lokal serta menerapkan mekanisme kerja yang efektif
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pendidikan	1. Meningkatnya kompetensi guru	1. Meningkatkan kompetensi kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan	1. Memperluas kesempatan untuk mengikuti diklat, pemberdayaan wadah

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern			
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pengembangan profesionalisme/pengawasan, penegakan disiplin dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan teknis
4. Meningkatkan kualitas pendidikan khususnya melalui bidang pusdokinfo (perpustakaan, dokumentasi dan informasi)	1. Meningkatnya minat baca masyarakat dan terbinanya perpustakaan	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan daerah dan perpustakaan masyarakat	1.Meningkatkan kemampuan SDM pengelola perpustakaan dan perpustakaan masyarakat 2.Menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang representatif
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu di kawasan Sumatera Bagian Tengah	1.Merintis pelayanan kesehatan yang spesifik (traumatic center)	1.Membangun pusat pelayanan kesehatan spesifik (traumatic center) sehat bagi masyarakat.
		2. Meningkatkan promosi dan cakupan pelayanan kesehatan	1.Memberikan imunisasi bagi balita dan ibu hamil 2. Melakukan upaya-upaya peningkatan gizi masyarakat 3. Melakukan pencegahan penyakit menular melalui peningkatan pemahaman masyarakat 4.Memberikan pengobatan gratis bagi semua warga kota di tingkat pelayanan puskesmas. 5. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang budaya hidup bersih
	2. Tersedianya prasarana dan sarana penunjang dan kesehatan	1. Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan	1.Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan
	3. Terlaksananya manajemen kesehatan yang profesional	1.Penguatan lembaga kesehatan (Rumah sakit, Puskesmas, Pustu, Klinik dll)	1.Memaksimalkan peranan puskesmas Posyandu dan pos kesehatan kelurahan dalam memberdayakan kesehatan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern			
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			masyarakat 2. Menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas di semua puskesmas, pusku, dan pos pelayanan kelurahan
6. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam keluarga	1. Meningkatnya mutu pelayanan keluarga berencana yang berkualitas	1. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana yang berkualitas baik yang dikelola oleh pemerintah maupun non pemerintah	1. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KB dengan SKPD terkait dan institusi masyarakat

Misi 5: Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan

Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang Kota Solok tidak terlepas dari permasalahan kemasyarakatan seperti pengangguran, anak terlantar, gelandangan, pengemis dan PSK. Untuk menanggulangi permasalahan ini diperlukan kepedulian bersama dari unsur masyarakat dan pemerintah baik berupa pencegahan, pengembangan, maupun perehabilitasian, untuk mengatasi permasalahannya agar para penyandang masalah sosial tersebut akan mampu menjalankan fungsi sosial dan kemasyarakatannya. Selain masalah sosial kemiskinan juga menjadi masalah yang harus dihadapi karena pada umumnya masyarakat yang termasuk ke dalam keluarga miskin umumnya rentan terhadap permasalahan sosial.

Berdasarkan data tahun 2010 persentase kemiskinan di Kota Solok masih relatif tinggi bila dibandingkan dengan kota-kota lain di Sumatera Barat, yakni mencapai angka 13,88%. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan menunjukkan pergerakan yang relatif lambat hal ini antara lain karena belum adanya keterpaduan atau sinkronisasi program yang dilaksanakan dan kegiatan antar lintas pelaku yang peduli terhadap penurunan angka kemiskinan, kurangnya kemauan dari masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinannya serta belum adanya data potensi keluarga miskin yang akan memudahkan untuk melakukan langkah-langkah penanggulangannya.

Tujuan yang akan dicapai dari peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan adalah Meningkatkan kapasitas lembaga dan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dengan sasaran meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan pekerja sosial, meningkatnya kapasitas lembaga-lembaga sosial, menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial dan menurunnya angka kemiskinan.

Untuk mewujudkan misi tersebut, dilaksanakan melalui beberapa strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 5

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertakwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern			
Misi 5 : Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kapasitas lembaga dan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial	1. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan pekerja sosial	1. Meningkatkan SDM dan kesejahteraan pekerja sosial	1. Memberikan pelatihan kepada pekerja sosial
	2. Meningkatnya kapasitas lembaga-lembaga sosial	1. Mengoptimalkan peranan lembaga sosial	1. Melakukan pemberdayaan kelembagaan sosial kemasyarakatan dan perempuan
	3. Menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial	1. Meningkatkan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	1. Mencegah, mengendalikan dan mengatasi masalah-masalah kesejahteraan sosial
	4. Menurunnya angka kemiskinan	1. Meningkatkan sinergitas program penanggulangan kemiskinan	1. Keterpaduan program penanggulangan kemiskinan

Misi 6: Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga

Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga merupakan unsur penting untuk mengantisipasi dan menangkal pengaruh negatif dari kemajuan teknologi informasi dan globalisasi. Hal ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga kepemudaan, meningkatkan fungsi dan peranan lembaga kepemudaan, serta meningkatkan kemandirian pemuda melalui pembinaan dan pengembangan potensi yang dimiliki.

Tujuan yang akan dicapai dari peningkatan pembinaan kepemudaan dan olah raga adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olah raga dan meningkatkan kompetensi kelembagaan pemuda dan olah raga.

Dengan sasaran meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana olah raga yang representatif, meningkatnya kompetensi kelembagaan pemuda dan meningkatnya prestasi olah raga.

Untuk mewujudkan misi tersebut, dilaksanakan melalui beberapa strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 6

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern			
Misi 6 : Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olah raga	1. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana olah raga yang representatif	1. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga	1. Menyediakan prasarana dan sarana olahraga yang representatif
2. Meningkatkan kompetensi kelembagaan pemuda dan olah raga	1. Meningkatnya kompetensi kelembagaan pemuda	1. Mengotimalkan peranan dan kompetensi kelembagaan kepemudaan	1. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan
	2. Meningkatnya prestasi olah raga	1. Mengotimalkan peranan cabang olahraga dalam pembibitan atlet berprestasi	1. Meningkatkan pembinaan terhadap kelembagaan cabang olahraga

Misi 7: Meningkatkan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata

Meningkatkan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata merupakan unsur penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Kondisi tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kuantitas prasarana dan sarana perdagangan, fasilitasi permodalan bagi UKM, kemitraan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta meningkatkan kualitas objek kepariwisataan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari peningkatan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perdagangan dan jasa, meningkatnya nilai tambah dan kualitas produk IKM dan UKM, meningkatkan pengembangan destinasi wisata daerah, meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan mengembangkan usaha pertanian yang berwawasan agribisnis.

Dengan sasaran tersedianya prasarana dan sarana perdagangan dan jasa yang representatif, meningkatnya kompetensi dan daya saing pelaku usaha perdagangan dan jasa serta industri kecil/rumah tangga, terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan ekonomi daerah, meningkatnya daya tarik obyek wisata, meningkatnya daya tarik obyek wisata, terciptanya lingkungan tempat usaha yang aman dan nyaman dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Untuk mewujudkan misi tersebut, dilaksanakan melalui beberapa strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 7

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern			
Misi 7 : Meningkatkan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perdagangan dan jasa	1. Tersedianya prasarana dan sarana perdagangan dan jasa yang representatif	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdagangan	1. Membangun pasar raya dan pasar grosir yang representatif (sebagai tahapan penyediaan prasarana dan sarana kota perdagangan dan jasa) 2.Revitalisasi pasar dan lingkungan di Pasar Raya Solok

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern			
Misi 7 : Meningkatkan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			(sebagai tahapan penyediaan prasarana dan sarana kota perdagangan dan jasa)
2.Meningkatnya nilai tambah dan kualitas produk IKM dan UKM	1.Meningkatnya kompetensi dan daya saing pelaku usaha perdagangan dan jasa serta industri kecil/rumah tangga	1.Melakukan pembinaan terhadap lembaga dan pelaku usaha perdagangan, KUKM dan IKM	1.Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan, UKM dan IKM 2.Inisiasi Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis 3.Peningkatan sistem dan manajemen pembinaan lembaga dan pengelola koperasi dan UKM
		2. Memfasilitasi permodalan bagi KUKM	1.Peningkatan kapasitas penyelenggara urusan Penanaman Modal
		3.Meningkatkan kualitas produk UKM dan IKM sehingga mempunyai daya saing di pasaran baik dari segi teknis produksi maupun manajemennya	1.Peningkatan kualitas dan kuantitas produk UKM dan IKM 2. Peningkatan regulasi terhadap keamanan barang yang dikonsumsi masyarakat. 3. Regulasi untuk meningkatkan akses Koperasi dan UKM dan terhadap modal, teknologi, dan pasar
	2.Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan ekonomi daerah	1.Meningkatkan pemanfaatan Teknologi informasi oleh pelaku usaha	1.Pemanfaatan TI untuk penguatan jaringan pelaku usaha ekonomi
3.Meningkatkan pengembangan destinasi wisata daerah	1. Meningkatnya daya tarik obyek wisata	1.Meningkatkan kualitas objek, kapasitas pelaku dan manajemen kepariwisataan	1.Peningkatan pembangunan prasarana sarana pariwisata 2.Peningkatan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri 3.Peningkatan SDM pengelola kepariwisataan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern			
Misi 7 : Meningkatkan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4.Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	1.Terciptanya lingkungan tempat usaha yang aman dan nyaman	1. Meningkatkan efektifitas pengaturan dan penataan lingkungan usaha	1. Peningkatan penataan kawasan usaha sektor informal/PKL 2. Penyederhanaan proses untuk memulai usaha, kerjasama investasi, promosi terpadu investasi, perdagangan dan pariwisata
5. Mengembangkan usaha pertanian yang berwawasan agribisnis	1.Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian	1.Meningkatkan kualitas SDM pertanian dan pelaku usaha pertanian	1.Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian
		2. Meningkatkan penerapan teknologi pertanian yang tepat guna	1. Meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan 2.Peningkatan pengelolaan kawasan hutan
		3.Meningkatkan produktifitas dan kualitas produk pertanian yang berorientasi pasar	1.Meningkatkan ketersediaan pangan dan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan 2.Melanjutkan dan meningkatkan revitalisasi pertanian 3.Revitalisasi pemanfaatan Kawasan hutan

Misi 8: Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum

Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum merupakan unsur penting dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan kondisi tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan dokumen perencanaan tata ruang yang operasional,

dan juga dengan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyediaan lahan untuk fasilitas umum kota.

Disamping itu, pembangunan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum juga perlu dilakukan untuk sinergitas program pembangunan dengan pemerintah propinsi Sumatera Barat, yakni rencana short cut Padang – Solok untuk pembangunan jalur kereta api, penanganan Batang Lembang dan pengembangan jaringan jalan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas kota Solok dengan wilayah sekitarnya.

Tujuan yang akan dicapai dari peningkatan pembangunan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang daerah, meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kota dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten, meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur kota, meningkatnya kualitas pelayanan air bersih, meningkatnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan permukiman, meningkatnya pengelolaan sanitasi kota (persampahan, air limbah dan drainase), meningkatnya kualitas pelayanan jasa transportasi, meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup

Untuk mewujudkan misi tersebut, dilaksanakan melalui beberapa strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 8

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern			
Misi 8 : Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang daerah	1.Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten	1.Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang yang operasional	1.Meningkatkan kualitas dan ketersediaan rencana tata ruang dan perencanaan wilayah 2.Menyusun regulasi pengendalian pemanfaatan ruang
		2.Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten	1.Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan tata ruang 2.Mendorong pengembangan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern

Misi 8 : Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			perumahan & permukiman sesuai peruntukan tata ruang
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kota	1.Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur kota	1.Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur kota (jalan dan jembatan, irigasi dan sungai)	1.Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan dan jembatan 2.Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi dalam memenuhi kebutuhan air bagi kegiatan pertanian
		2.Meningkatkan penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum kota	1.Meningkatkan penataan penguasaan tanah terutama aset tanah pemerintah daerah (penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur)
	2.Meningkatnya kualitas pelayanan air bersih	1.Meningkatkan kapasitas air baku untuk air minum	1.Meningkatkan pelayanan dan kualitas air bersih bagi masyarakat sesuai dengan standar kesehatan
	3.Meningkatnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan permukiman	1.Mendorong dan memfasilitasi penyediaan dan pengembangan perumahan yang layak huni dan berwawasan lingkungan	1.Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman
	4.Meningkatnya pengelolaan sanitasi kota (persampahan, air limbah dan drainase)	1.Meningkatkan kapasitas penyediaan dan pengelolaan sanitasi.	1.Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan sanitasi (persampahan, air limbah dan drainase lingkungan)
	5.Meningkatnya kualitas pelayanan jasa transportasi	1.Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan perhubungan dan lalu lintas yang menyeluruh dan terpadu	1.Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum 2.Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern			
Misi 8 : Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3.Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perhubungan (termasuk jalur kereta api) dan lalu lintas
3.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1.Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	1.Meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	1.Meningkatkan kualitas dan akses informasi lingkungan hidup 2.Meningkatkan upaya pengendalian banjir melalui pelebaran/ rehabilitasi/ pemeliharaan bantaran/tanggul sungai (Batang Lembang dan sungai lainnya) 3.Meningkatkan penyediaan RTH
		2.Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan hidup	1.Meningkatkan regulasi dan penegakan aturan untuk pengendalian kualitas lingkungan
		3.Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	1.Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan limbah domestik dan limbah industri

Misi 9: Meningkatkan pemberdayaan dan pendapatan masyarakat

Meningkatkan pemberdayaan dan pendapatan masyarakat merupakan unsur penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kemitraan dengan berbagai pihak, mengoptimalkan peran BMT dan koperasi jasa dan keuangan syariah, disamping itu juga dengan mengoptimalkan pendataan potensi rumah tangga di setiap kelurahan.

Tujuan yang akan dicapai dari peningkatan pemberdayaan dan pendapatan masyarakat adalah meningkatkan kapasitas lembaga sosial dan ekonomi masyarakat kelurahan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, mewujudkan tenaga kerja yang terampil dan profesional sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Dengan sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat kelurahan, Tersedianya fasilitas permodalan bagi usaha mikro kelurahan dan lembaga keuangan mikro yang berbasis masjid, Berkembangnya lembaga keuangan mikro yang berbasis masjid, Meningkatnya pelayanan lembaga amil zakat, Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan ekonomi, politik dan sosial budaya, Meningkatnya keterampilan dan produktifitas tenaga kerja dalam pasar kerja.

Untuk mewujudkan misi tersebut, dilaksanakan melalui beberapa strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 9

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertakwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern			
Misi 9 : Meningkatkan pemberdayaan dan pendapatan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kapasitas lembaga sosial dan ekonomi masyarakat kelurahan	1.Meningkatnya kapasitas kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat kelurahan	1.Mengoptimalkan kelembagaan pemberdayaan masyarakat	1.Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
	2.Tersedianya fasilitas permodalan bagi usaha mikro kelurahan dan lembaga keuangan mikro yang berbasis masjid	1.Mengoptimalkan potensi BUMN/BUMD	1.Memfasilitasi lembaga ekonomi masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari BUMN/BUMD
	3.Berkembangnya lembaga keuangan mikro yang berbasis masjid	1.Mengoptimalkan BMT dan koperasi berbasis syariah	1.Meningkatkan pembinaan terhadap BMT dan koperasi berbasis syariah
	4.Meningkatnya pelayanan lembaga amil zakat	1.Mengoptimalkan peranan lembaga amil zakat	1.Meningkatkan pembinaan terhadap lembaga amil zakat
2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan	1.Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan ekonomi, politik dan sosial budaya	1.Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perempuan	1.Melakukan pembinaan dan keterampilan teknis bagi pengelola organisasi perempuan
3. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil dan profesional sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	1.Meningkatnya keterampilan dan produktifitas tenaga kerja dalam pasar kerja	1.Memberdayakan angkatan kerja agar mampu bersaing dalam pasar kerja	1.Meningkatkan keterampilan teknis pencari kerja

Misi 10 : Menegakkan peraturan daerah yang berkeadilan

Menegakkan peraturan daerah yang berkeadilan merupakan hal yang tidak kalah penting untuk tegaknya supremasi hukum dengan tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Dengan cara demikian diharapkan salah satu fungsi Pemerintah dalam hal pengaturan dapat berjalan dengan baik, dan kesadaran masyarakat serta aparaturnya agar taat terhadap hukum selalu meningkat, sehingga tercipta suasana yang aman dan tertib serta kondusif untuk pelaksanaan pembangunan.

Tujuan yang akan dicapai dari penegakkan peraturan daerah yang berkeadilan adalah mewujudkan supremasi hukum di tengah masyarakat, dengan sasaran meningkatnya penegakan peraturan daerah dan Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah yang terkait dengan pelayanan dan pengaturan masyarakat

Untuk mewujudkan misi tersebut, dilaksanakan melalui beberapa strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 10

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertakwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern			
Misi 10 : Menegakkan peraturan daerah yang berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan supremasi hukum di tengah masyarakat	1.Meningkatnya penegakan peraturan daerah	1.Menyiapkan piranti hukum yang menjamin hak publik atas informasi setiap kebijakan pemerintah daerah	1.Menyediakan produk hukum daerah yang menjamin ketersediaan informasi tentang kebijakan publik
	2.Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah yang terkait dengan pelayanan dan pengaturan masyarakat	1.Meningkatkan sosialisasi yang efektif terhadap peraturan daerah	1.Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan (premanisme, perjudian, eksploitasi anak dibawah umur, peredaran/penggunaan miras dan narkoba, dan lain sejenisnya) 2.Meningkatkan kualitas penyuluhan politik masyarakat
		2.Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga penegak hukum	1.Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (Satpol PP, TNI/Polri dan masyarakat)